



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

Nomor : ~~3483~~UN27/PP/2013

26 MAR 2013

Lampiran : 1 lb

Hal : Ijin penyelenggaraan dan akreditasi Program Studi

Yth. ① Para Dekan

2. Direktur Program Pascasarjana

3. Ketua Program Studi

Di lingkungan UNS


Menunjuk surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa agar program studi di lingkungan UNS tidak terkena sanksi penutupan/pencabutan ijin penyelenggaraan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan program studi (termasuk program studi baru) di lingkungan UNS yang belum mengajukan akreditasi agar segera menyusun borang sesuai ketentuan dan berkonsultasi dengan KJM UNS.
2. Program studi yang memperoleh akreditasi C khususnya program studi baru yang memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum tanggal 10 Agustus 2012, agar segera mengajukan reakreditasi ke BAN PT tanpa menunggu masa berlaku akreditasi habis dan mengupayakan agar memperoleh hasil lebih baik.
3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana agar memfasilitasi dan mendorong ketua program studi (termasuk program studi baru) yang sedang dan akan menyusun borang akreditasi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan

Yth. Rektor sebagai laporan

An. Rektor,
Pembantu Rektor I

Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19600809 198612 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104 Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 160/E/AK/2013
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.

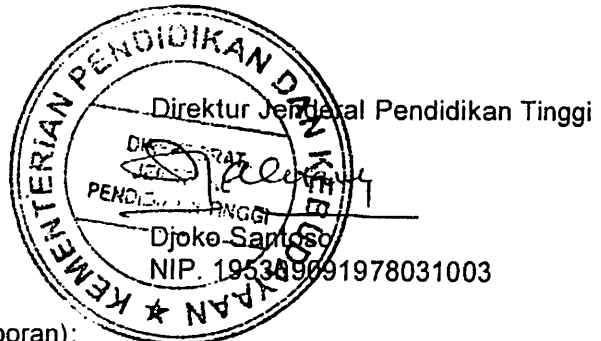
1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah; ✓
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.

Subdit Pemb28/02/2013)